

# TAHAPAN GERAKAN SOSIAL SIDNEY TARROW DALAM KASUS SERIKAT PETANI PIONDO SULAWESI TENGAH

*Jurnal Analisa Sosiologi*

Januari 2022, 11 (1): 73-95

Efraim Yudha Irawan<sup>1</sup>, Wahyu Gunawan<sup>2</sup>, Munandar Sulaeman<sup>3</sup>

## **Abstract**

*This study discusses the emergence of a social movement based on farmer independence in Piondo, Central Sulawesi. The movement emerged as a response to the conflict between farmers and PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) and PT Berkas Hutan Pusaka (BHP). The data search was carried out qualitatively with the case study method. The stages of the movement that emerged were read from the perspective of Sidney Tarrow where there were five stages carried out by farmers. Analysis with the survival mechanism perspective of James Scott shows that during the struggle for land acquisition, farmers must reduce the quality of their food, make independent efforts to find additional income, so that a network is formed for them to survive and regain their agricultural land.*

**Keywords:** *Social Movement, Conflict, Farmer, Survival*

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang munculnya gerakan sosial yang berbasis pada kemandirian petani di Piondo, Sulawesi Tengah. Gerakan muncul sebagai respon atas konflik antara petani dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT Berkas Hutan Pusaka (BHP). Pencarian data dilakukan secara kualitatif dengan metode studi kasus. Tahapan gerakan yang muncul dibaca dengan perspektif Sidney Tarrow dimana ada lima tahapan yang dilakukan petani. Analisis dengan perspektif mekanisme bertahan hidup James Scott menunjukkan bahwa selama memperjuangkan pembebasan lahan, petani harus menurunkan kualitas pangannya, melakukan swadaya mencari tambahan pendapatan, hingga terbentuk jaringan bagi mereka untuk bertahan hidup dan mendapatkan kembali lahan pertaniannya.

**Kata Kunci:** *Gerakan Sosial, Konflik, Petani, Bertahan Hidup*

## **PENDAHULUAN**

Ketimpangan struktur penguasaan sumber-sumber agraria merupakan salah satu faktor penyebab munculnya konflik agraria dan kemudian menjadi suatu gerakan sosial. Lahirnya konflik agraria ini, umumnya didasari pada perebutan kekuasaan sumber-sumber agraria dengan

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

<sup>1</sup> efraimyudha@gmail.com

berbagai kepentingan. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris rupanya memiliki sejarah panjang dalam mengalami konflik berkaitan dengan agraria. Konflik agraria di Indonesia sudah berjalan dengan cukup lama, yaitu pada tahun 1970 dimana konflik yang muncul adalah antara pemerintah dengan masyarakat (Sabar 2017; Wahyudi 2010).

Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), secara tegas mengamanatkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya banyak konflik agraria yang terjadi dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dalam memberikan ruang bagi para kuasa modal yang bergerak di bidang pertambangan maupun industri perkebunan sawit. Berkembangnya industri minyak kelapa sawit menjadikan sumber daya lahan semakin terbatas, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan perkebunan inti-plasma untuk mengkonversi lahan milik masyarakat menjadi perkebunan sawit yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan kapital yang membutuhkan lahan yang cukup luas dalam pengelolaannya (Putra 2020). Akibatnya, kini eksploitasi dan ekstraksi sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya lebih banyak untuk melayani kepentingan ekonomi pasar daripada untuk kepentingan rakyat sendiri (Cahyono 2017). Padahal, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut didominasi oleh masyarakat petani yang juga membutuhkan lahan garapan sebagai pekerjaan utama. Inilah yang kemudian menyulut adanya konflik petani dan perusahaan.

Konflik tersebut muncul karena petani merasa dirugikan dengan adanya perluasan lahan tanpa diberikan ganti rugi sebelumnya oleh perusahaan maupun pemerintah. Petani pada posisi ini sebagai pihak yang disingkirkan dan tidak dianggap penting, sehingga ganti rugi kepada mereka seolah bukan menjadi prioritas yang utama (Bernstein 2019). Perusahaan sendiri bersikap tidak transparan mengenai luas lahan, pembagian keuntungan, serta ketidakjelasan hak atas tanah. Dalam perluasan lahan perkebunan, perusahaan dan pemerintah melakukan kerjasama untuk memanfaatkan lahan masyarakat melalui proses jual beli dengan harga yang cukup murah (Fahrimal and Safpuriyadi 2018). Kemudian, semangat mencari keadilan dan kesejahteraan melalui perlawanan terhadap belenggu

penindasan telah mendorong munculnya gerakan sosial dimana kaum tertindas memposisikan diri sebagai subjek yang aktif dalam menentukan masa depannya dan melalui gerakan kaum perempuan (Zaiful 2020).

Data terbaru yang diungkapkan Dewi Kartika selaku Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) permasalahan di Indonesia menunjukkan bahwa konflik tertinggi terjadi pada sektor perkebunan. Pada tahun 2021, kasus naik menjadi 122 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 87 kasus. Selanjutnya, konflik tertinggi kedua pada sektor kehutanan yaitu 41 kasus yang juga meningkat 100% dibandingkan tahun 2019 sebanyak 20 kasus. Kasus-kasus tersebut secara total telah menimbulkan kerugian kepada 359 daerah dengan 135.332 Kepala Keluarga (KK) di seluruh Indonesia (Fadli 2021).

Dari sebaran data konflik agraria yang dihimpun KPA, secara geografis 241 letusan konflik agraria di tahun 2020 terjadi di 30 provinsi di Indonesia. Sulawesi tengah menjadi salah satu provinsi yang tak luput dari konflik agraria yang terjadi (KPA 2021).

Berdasarkan berita yang dimuat di [metrosulteng.com](http://metrosulteng.com) mengungkapkan bahwa konflik agraria yang terjadi di beberapa Kabupaten di Sulawesi Tengah di antaranya Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Buol merupakan konflik yang didominasi oleh rusahaan-perusahaan perkebunan sawit skala besar yang menimbulkan konflik terhadap petani. Di Kabupaten Banggai terdapat kasus perampasan lahan, alih fungsi kawawasan hutan dan kriminalisasi terhadap Ibu Samria oleh PT Kurnia Luwuk Sejati. Di wilayah yang sama, PT Sawindo Cemerlang melakukan kriminalisasi pada seorang petanin transmigran bernama Bapak Suparman.

Konflik agraria diawali dengan lahirnya pemikiran-pemikiran kritis, diskusi, dan berbagai aksi kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk saling menyelamatkan diri dari dampak konflik lahan dan melawan ekspansi kapital (Novianto 2017). Proses penguatan organisasi petani sangat dibutuhkan dalam momen mendapatkan lahan garapan (Hak, Nonci, and Budiarto 2019). Melalui diskusi yang dilakukan kemudian melahirkan aksi atau tindakan untuk mengubah kondisi yang ada, seperti aksi protes maupun lobi kepada pemerintah terkait. Beberapa upaya yang sering dilakukan oleh

petani demi mempertahankan haknya atas lahan biasanya dilakukan melalui organisasi, aliansi, dan jejaring masyarakat tani.

Menggunakan perspektif gerakan sosial milik (Tarrow 1993), penelitian ini membahas secara khusus mengenai siklus atau tahapan gerakan sosial kolektif berkaitan dengan konflik agraria di wilayah Toili, Piondo, Sulawesi Tengah. Dalam melihat dinamika gerakan sosial, Tarrow menawarkan adanya lima tahapan yang dikaitkan dengan aksi protes terhadap penguasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertekan (Tarrow 1993:284–86): (1) *Heightened conflict*, yaitu ketika permasalahan muncul dalam suatu sistem sosial, tidak hanya pada konteks industri tetapi juga pada lingkungan pedesaan ataupun institusi pendidikan; (2) *Geographic and sectoral diffusion*, ketika ide atau gagasan gerakan tersebar dari daerah yang berkonflik (*central*) dan meluas ke daerah lain (*peripheral*) inilah yang kemudian memicu munculnya gelombang protes secara massal; (3) *Social movement organizations*, yaitu munculnya organisasi untuk memastikan strategi dan hasil yang ingin dicapai; (4) *New frames of meaning*, ketika gerakan protes yang dilakukan sebelumnya melahirkan ideologi-ideologi baru yang menjadi landasan pemahaman atas realitas yang dialami; (5) *Expanding repertoires of contention* atau memperluas repertoar pertikaian. Repertoar adalah istilah yang sering digunakan oleh Charles Tilly dan Sidney Tarrow untuk menganalogikan “nyanyian” gerakan yang selalu digaungkan dalam protes-protes sosial. Pada siklus ini, gerakan sosial menjadi wadah bagi gerakan atau protes-protes baru yang akan muncul kemudian.

Siklus yang ditawarkan oleh Tarrow (1995) bukanlah proses yang selesai dimana gerakan akan habis atau hilang ketika protes sudah dilakukan. Justru, Tarrow sekali lagi menekankan adanya keberlanjutan pada siklus yang kelima dimana gerakan sosial menjadi wadah bagi alat-alat protes yang baru. Penekanan juga disampaikan pada siklus ketiga dimana keberadaan organisasi menjadi cara untuk memastikan gerakan memiliki strategi dan hasil yang jelas.

Gerakan sosial tidak selalu berkaitan dengan organisasi yang terbentuk secara formal. Akan tetapi, Tarrow lebih berfokus pada aksi gerakan itu sendiri secara keseluruhan daripada formalisasi organisasinya.

Keberlanjutan menjadi kekuatan yang dinilai sebagai indikator penting untuk mewujudkan perlawanan kepada pihak penguasa (Tarrow 2011). Meskipun pada praktiknya, organisasi formal dengan atribut-atributnya memiliki peluang untuk menjaga perjuangan tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama, kajian Tarrow lebih mengarah pada dinamika yang terjadi di dalam gerakan untuk mencapai tujuan bersama.

Penelitian ini berfokus pada konflik agraria yang terjadi di Desa Piondo, Kecamatan Toili, Luwuk, Sulawesi Tengah yang terjadi antara petani Toili dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT Berkas Hutan Pusaka (BHP). Permasalahan muncul pertama kali ketika sekitar tahun 1990 pemerintah menerbitkan ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT BHP dan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT KLS. Pada praktiknya, pemberian ijin ini menimbulkan konsekuensi perampasan tanah adat, perampasan, pengusuran lahan bersertifikat, pembabatan hutan, dan sengketa proyek transmigrasi yang mengorbankan kehidupan sosial ekonomi petani dan lingkungan ekologis lahan pertanian (Aprianto 2013; Badrah 2011). Rasa keterancaman mereka dan menyebarkanluaskannya kepada publik lewat aksi-aksi yang dilakukann di lapangan, serta lewat penyebarluasan berita yang dalam hal ini memanfaatkan hubungan yang terjalin dengan media massa (Putra, Alfiandi, Afrizal 2021)

Kemudian, dengan menggunakan teori *mekanisme survival* pandangan Scott (1994) penelitian ini ingin melihat kemandirian secara ekonomi dan sosial yang lahir dari gerakan yang awalnya bertujuan untuk melayangkan aksi protes. Menurut Scott (1994) tindakan *survival* biasanya disebut juga dengan etika subsistensi, yaitu etika bertahan hidup dalam kondisi minimal. Dalam pandangannya, Scott mengemukakan bahwa keluarga petani harus dapat bertahan melalui tahun-tahun dimana hasil bersih panenya atau sumber-sumber lainnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya

Ciri dari pandangan ini adalah petani berusaha seminimal mungkin untuk menghindari dari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya. Tidak berfokus pada mendapatkan keuntungan yang besar dan mengabaikan risiko atau dampak buruk yang akan terjadi. Para petani harus bertahan hidup di masa sulit dengan mengkonsumsi makanan yang mutunya lebih

rendah dengan hanya makan sekali dalam sehari. Kemudian pada tingkat keluarga, ada berbagai alternatif substensi yang dapat digolongkan sebagai swadaya, seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang kecil, sebagai buruh lepas atau harus bermigrasi. Ketiga adalah jaringan dan lembaga yang berada diluar keluarga yang dapat membantu dan memiliki fungsi sebagai peredam-kejuatan di masa sulit petani (Scott 1994:40–41).

Penelitian ini berupaya memberikan gambaran mekanisme bertahan hidup yang dilakukan oleh petani di Piondo dengan melakukan berbagai macam cara dan berujung pada terbentuknya serikat tani. Menarik bahwa kemandirian secara ekonomi dan sosial justru lahir dari gerakan yang awalnya bertujuan untuk melayangkan aksi protes. Oleh karena itu, tulisan ini membahas bagaimana teori mekanisme survival membaca dinamika yang terjadi dalam tahapan gerakan kelompok petani Piondo mulai dari gerakan sosial yang bersifat protes menjadi gerakan yang bersifat memberdayakan.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara kualitatif dengan metode studi kasus. Melalui metode ini, peneliti bermaksud memahami peristiwa yang dialami Serikat Petani Piondo dari segi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aktivitas lain yang dilakukan oleh kelompok tani dalam kondisi yang natural (Cresswell 2010; Stake 1995). Peneliti sudah melakukan pengamatan atau observasi secara langsung di desa Piondo untuk mengumpulkan data dan memahami siklus tahapan terbentuknya gerakan Serikat Petani Piondo. Wawancara dan observasi dilakukan dengan terjun langsung terlibat dengan komunitas dan berbicara kepada individu-individu kunci informasi mengenai terbentuknya serikat dan bagaimana perkembangan yang dialami sejak pertama kali gerakan sosial dilakukan (Cresswell 2010:254).

Penelitian dilakukan di Desa Piondo, Kecamatan Toili, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah. Peneliti melakukan wawancara dan observasi partisipasi dimana peneliti tidak hanya sebagai pengamat tetapi juga terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Narasumber yang menjadi kunci informasi di

sini adalah Joko sebagai sekretaris petani Piondo yang menjalankan fungsi koordinasi dan pengarsipan data-data serikat. Kedua adalah Heru sebagai salah satu ketua harian Serikat Petani Piondo. Narasumber ketiga adalah Edy yang sejak awal mula perjuangan sudah berperan aktif dalam pengembangan pola-pola pertanian alami.

Analisis data studi kasus (Yin 2009) dilakukan dengan melakukan perbandingan pola dengan mengamati hasil wawancara dengan hasil observasi sehingga memungkinkan untuk ditemukan data yang valid. Ini yang kemudian digunakan sebagai dasar masuk ke tahap eskplanasi untuk membuat bangunan penjelasan atas apa yang terjadi dalam kasus gerakan Serikat Petani Piondo. Penerapan analisis deret waktu digunakan untuk melihat adanya pola perkembangan informasi dan kejadian dari waktu ke waktu. Melalui analisis data ini, peneliti bisa mendapatkan pola terbentuknya serikat tani dalam bentuk tahapan-tahapan gerakan serta kompleksitas kasus yang terjadi di dalamnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Kemunculan Konflik Petani dengan Perusahaan**

Konflik atas perebutan lahan yang terjadi di Dataran Toili, Kabupaten Banggai, memuncak pada penangkapan petani atas tuduhan pembakaran alat berat yang dilakukan oleh petani. Aksi ini bermula dari pihak perusahaan yang semakin memperluas ekspansinya dan bahkan sampai melakukan pengusuran di wilayah lahan yang dikuasai dan dikelola oleh petani. Setidaknya ada 24 orang petani yang ditangkap atas tuduhan pembakaran alat berat. Aksi demonstrasi yang dilakkan oleh petani setidaknya sebagai bentuk mempertahankan diri terhadap hak atas tanah yang mereka kelola.

Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan, konflik agraria penguasaan lahan antara masyarakat Desa Piondo dan Desa Bukit dengan PT. Berkat Hutan Pusaka (BHP) dan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) sudah berlangsung lama. Konflik agraria ini terjadi dimulai ketika PT BHP dan PT KLS mulai melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit. Setidaknya, sekitar 184 Ha areal perkebunan milik petani Desa Piondo tumpang tindih

dengan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan (Badrah 2011).

Berdasarkan SK Menhut Nomor 146/kpts-II/1996, 4 April tahun 1996, PT.BHP memegang izin HTI seluas 13.400 Ha di wilayah Toili dan Toili Barat. Pada awalnya, PT BHP merupakan perusahaan patungan dari PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS). Namun saat ini PT KLS sudah mengakuisisi seluruh saham perusahaan.

Menurut penuturan Joko sebagai salah satu petani desa Piondo, konflik ini bermula ketika pada tahun 2007, perusahaan mulai melakukan pengusuran untuk perluasan perkebunan sawit yang kemudian pada proses pengusuran itu lahan perkebunan yang bersertifikat milik masyarakat Desa Piondo juga ikut tergusur. Bagi Bapak Joko, lahan tersebut merupakan lahan produktif dan menjadi sumber kehidupan sebagai penopang hidup.

Pada tahun 2008 perlawanan petani mulai muncul melalui berbagai bentuk aksi protes, salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan penguasaan pada tanah-tanah yang diklaim oleh perusahaan. Perlawanan terhadap pihak perusahaan dilakukan karena keresahan yang petani rasakan atas semakin berkurangnya tanah/lahan garapan.

Joko sebagai sekretaris serikat petani Piondo, *“setiap hari kami bersama kawan-kawan harus menginap di kebun, selain terus menanam, menjaga dan merawat tanaman, kami juga harus menjaga tanah kami dari mandor-mandor perusahaan yang terus manam sawitnya di lahan kami. Bahkan beberapa kali kami sempat menghindari akibat mereka mengajak polisi pada saat menanam.”*

Tindakan-tindakan yang mulai masif dilakukan oleh PT KLS pada tahun 2008, di antaranya adalah pengusuran untuk menggunakan lahan pertanian yang sudah ditanami oleh petani Piondo. Tanaman tani tersebut digusur dan ditanami kembali dengan kelapa sawit milik perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan juga melakukan penimbunan jalan yang menutup akses petani Piondo ke lahan pertanian mereka sendiri.

Proses pengusuran dan penanaman yang seringkali dilakukan oleh perusahaan mendapat pendampingan dari pihak aparat aparat negara, dalam hal ini adalah aparat kepolisian dan TNI setempat (Polsek dan Babinsa).

Keadaan yang semakin memprihatinkan ini, membuat petani semakin keras melakukan protes dan perlawanan.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Heru selaku salah satu ketua harian serikat petani Piondo : *“saat itu, saya dan kawan-kawan begitu kuatir atas nasib kami, mau tidak mau kami harus bersatu, sama-sama berjuang. Tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. karena petani mengalami kesulitan, karena sawah hendak tidak mencukupi, keluarga semakin bertambah sementara tanah itu itu saja, sementara ada perusahaan yang diberikan ijin untuk menjarah dan diberikan ijin yang skala luas.*

Bersama dengan Front Advokasi Sawit (FRAS), aliansi yang dibentuk oleh beberapa NGO melakukan proses pendampingan dan pengadvokasian kasus-kasus sengketa lahan yang berada di Tulawesi Tengah. Para petani Piondo melakukan protes terhadap PT. KLS dalam bentuk aksi demonstrasi bersama-sama yang dilakukan beberapa kali di Kota Luwuk.

Berdasarkan temuan dan catatan lapangan, penimbunan-penimbunan jalan yang dilakukan oleh PT KLS setidaknya terjadi pada bulan Oktober 2009 dan bulan Mei 2010. Pada penimbunan yang dilakukan di bulan Mei 2010, perusahaan mendapatkan pengawalan dari aparat negara ± 350 orang aparat TNI yang berasal dari KODIM 1308 Luwuk. Proses ini kemudian memancing reaksi keras para petani yang berujung pada pembakaran alat berat buldozer dan ekskavator milik perusahaan serta pembakaran salah satu *camp* milik perusahaan.

Aksi protes masyarakat ini tidak terjadi begitu saja. Sebelum melakukan tindakan pembakaran, masyarakat sudah beberapa kali mengusahakan negosiasi kepada PT KLS. Pada kesempatan-kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan bahwa upaya negosiasi yang mereka tuntut bertujuan agar tidak perlu ada tindakan anarkis yang merugikan banyak pihak. Akan tetapi, upaya tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan. Hingga pada akhirnya, tanggal 26 Mei 2010 terjadi aksi besar-besaran yang terdiri dari beberapa desa, antara lain Desa Piondo, Desa Bukit Jaya, Desa Singkoyo, Desa Mekarsari, Desa Moilong, dan Desa Tou. Selain petani, aksi ini juga diikuti oleh para masyarakat penambang emas tradisional yang ikut meminta dibukanya jalan akses masuk.

Aksi massa yang tidak ditanggapi oleh PT. KLS ini akhirnya memicu tindakan anarkis yang secara spontan dilakukan warga yang berjuang. Satu unit Ekskavator, satu Bulldoser, dan satu camp milik PT KLS menjadi sasaran emosi perjuangan warga pada waktu itu. Buntut dari aksi tersebut, sebanyak 23 petani ditangkap bersama dengan seorang aktivis bernama Eva Susanti atau yang kemudian dikenal sebagai Eva Bande.

Perjuangan kemudian berlanjut pada pembebasan 23 petani dan Eva Bande dari jeratan hukum yang memvonis Eva Bande 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Luwuk. Proses tersebut berlangsung sangat cepat. Selanjutnya, pihak Eva Bande melakukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Palu, namun menerima penolakan di tingkat kasasi. Eva Bande tidak berjuang sendirian, dia didukung oleh kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Aktivis dan Petani Banggai. Mereka melakukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK). Pada tanggal 4 September 2014, dilakukan sidang perdana PK bagi Eva Bande di Pengadilan Negeri Luwuk (LBH-Jakarta 2014).

Sejak 2016, pemerintah Desa dan serikat petani Piondo bekerja sama dengan Yayasan Merah Putih dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif serta beberapa mahasiswa Universitas Tadulako yang turut ambil bagian, melakukan proses pemetaan secara partisipatif bersama para petani. Proses ini dilakukan untuk memperjelas status lahan yang dimiliki oleh petani. Dan digunakan sebagai basis data perlawanan untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki. Proses diawali dengan melakukan pendataan subjek dan objek lahan garapan sampai pada proses penguatan organisasi.



**Gambar 1. Bapak menjelaskan peta kawasan yang diperjuangkan**

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Kemudian, Bersama dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria, melalui program Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA), sebagai perwujudan Desa berbasis reforma agraria, dijadikan sebagai satu program strategis untuk memetakan potensi sumber daya alam yang dimiliki mulai pada tahun 2017 dengan beberapa proses penguatan kapasitas organisasi atau serikat tani. Penguatan kapasitas dimulai dengan melakukan pelatihan pertanian organik, memahami potensi desa yang bisa diolah, hingga membuat produk turunan yang dapat meningkatkan nilai jual hasil.



**Gambar 2. Pelatihan peningkatan Kapasitas**

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Menurut perkataan Bapak Edy, selaku ketua pengembangan pertanian alami Serikat petani Piondo, dalam mewujudkan DAMARA, organisasi mencoba melakukan sinergi dengan program pemerintah desa dalam meningkatkan hasil panen petani yang ada di desa. Salah satu langkahnya adalah dengan membantu melalui proses pemasaran dan kelengkapan dokumen terkait pengurusan izin BPOM.

## **Pembahasan**

### **Tahapan Gerakan Petani**

Dinamika gerakan sosial kelompok tani Piondo dijelaskan dalam siklus yang dikemukakan oleh Tarrow (1993:284–86) sebagai berikut:

- 1) *Heightened conflict*, Ketimpangan struktur agraria yang terjadi di dataran Toili merupakan sebuah konflik pertentangan kelas yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Ketimpangan struktur agraria

ini yang pada kenyataannya kemudian menimbulkan konflik agraria antar kelas. Pertentangan kelas yang disebabkan oleh perbedaan dan kebutuhan pada akses pada sumber-sumber agraria (modal). Tanah sebagai sumber agraria yang menjadi kebutuhan hidup utama kaum tani dataran Toili, kini justru harus dipinggirkan akibat perampasan dan monopoli tanah atas kuasa modal melalui izin – izin yang dikeluarkan oleh Negara kepada perusahaan.

Konflik yang telah berlangsung lama antara masyarakat petani di Kecamatan Toili dan Toili Barat dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) dan PT Berkas Hutan Pusaka (BHP) terjadi ketika PT KLS dan PT BHP mulai melakukan konversi hutan ke perkebunan sawit. PT KLS yang merupakan sebuah perusahaan perkebunan sawit yang menguasai saham atas PT BHP yang bergerak dalam bidang Hutan Tanaman Industri (HTI). PT BHP sendiri adalah pemegang izin HTI seluas 13.400 Ha di Wilayah Kecamatan Toili dan Toili Barat berdasarkan SK Menhut No. 146/kpst-II/1996, 4 April 1996.

Konflik sengketa tanah antara masyarakat Desa Piondo, Desa Bukit Jaya, Desa Singkoyo dan Desa Moilong di Kecamatan Toili dengan PT Kurnia Luwuk Sejahtera (PT KLS) dan PT Berkas Hutan Pusaka (BHP), bermula ketika PT KLS dan PT BHP mulai melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di lahan milik masyarakat desa Piondo. Setidaknya ada sekitar 184 Ha areal perkebunan milik petani Desa Piondo tumpang tidih dengan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan.

Kebutuhan atas hak kelola lahan perkebunan antara masyarakat petani Desa Piondo dengan PT KLS yang kemudian menjadi pemicu konflik dalam memperebutkan tanah sebagai sumber daya utama. Kondisi ini yang kemudian menjadi keresahan masyarakat Petani Desa Piondo. Keterbatasan terhadap akses untuk bekebun menjadi suatu keresahan tersendiri yang dirasakan masyarakat desa Piondo karena harus berhadapan dengan kuasa modal yang mendapatkan dukungan melalui peran negara sebagai pembuat kebijakan.

- 2) *Geographic and sectoral diffusion*, Keresahan akibat suatu kondisi yang tidak begitu menguntungkan, membuat para petani harus melakukan

suatu gerakan. Kondisi ketimpangan struktur agraria yang terjadi di dataran Toili, membangun satu ikatan kolektif. Situasi ini yang mereka rasakan tidak cukup menguntungkan bagi mereka yang hanya menggantungkan hidupnya terhadap lahan garapan.

Penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa petani melihat situasi ini tidak menguntungkan karena mereka harus berhadapan dengan pemodal. Petani di sini hanya memiliki pengetahuan terbatas dan akses komunikasi yang tidak begitu mendukung. Sedangkan di sisi lain, perusahaan memiliki jaringan yang cukup kuat untuk melakukan berbagai macam cara, seperti bekerja sama dengan aparaturnegara terkait untuk melanggengkan praktik-praktik ekspansi perkebunan. Akses yang dimiliki perusahaan mulai dari aparaturnegara, kepolisian, dan pemerintah setempat.

Petani yang pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk berfikir cara-cara berjuang, akhirnya harus melakukan perlawanan dan menggabungkan ide dan berkumpul untuk membahas bagaimana cara berlawanan pada perusahaan. Kebutuhan atas hak hidup dan tanah sebagai sumber utama penghidupan kaum tani menjadi dorongan utama perlawanan petani kepada perusahaan yang melakukan konversi lahan. Didorong oleh situasi yang sama, keresahaan akibat ketimpangan struktur agraria yang dirasakan masyarakat Piondo ternyata sama pula dirasakan di hampir setiap wilayah desa yang berada di dataran Toili.

- 3) *Social movement organizations*. Dalam prosesnya, muncul keresahaan yang dirasakan bersama oleh para petani. Berkumpul dari satu rumah ke rumah lain, petani mulai mengajak orang-orang yang mengalami keadaan yang sama terhadap kekhawatiran atas kehilangan lahan garapan.

Berawal dari kegiatan berkumpul secara informal ini, kemudian para petani saling berdiskusi mencari jalan keluar secara bersama. Sampai pada akhirnya diskusi itu berujung pada kesepakatan untuk membentuk serikat organisasi tani di dataran Toili dengan basis pengelolaannya dibagi di setiap desa. Organisasi tani inilah yang kemudian menjadi satu bentuk wadah perjuangan atas representasi masalah agraria yang mereka alami.

Pada tanggal 24 September 2009 terbentuklah Serikat Petani di Piondo dan di beberapa desa yang ada di dataran Toili. Pihak yang terlibat dalam Serikat Petani Piondo (SPP) ini tidak hanya dari petani saja, melainkan juga melibatkan pihak-pihak eksternal seperti para aktivis, NGO, dan mahasiswa. Tepatnya pada tanggal 30 September 2009, serikat-serikat tani ini yang kemudian beraliansi mendeklarasikan diri, melakukan aksi protes demonstrasi di Kantor Kepolisian Resort Banggai, kantor Pengadilan Negeri, dan kantor Bupati Banggai. Aksi demonstrasi tersebut sebagai bentuk protes dan menuntut penyelesaian kasus tanah di dataran Toili.

- 4) *New frames of meaning*. Gerakan petani yang bertransformasi dari gerakan individu kemudian menjadi gerakan kolektif yang terorganisir dengan membentuk suatu wadah perjuangan. Serikat Petani Piondo keanggotaannya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang tanahnya dirampas. Para petani mulai menata alur gerakan dengan menambah kapasitas anggota melalui langkah-langkah strategis agar dapat meningkatkan kualitas hidup para anggota petani itu sendiri. Selain melakukan pendudukan lahan dan melakukan demonstrasi, para anggotanya juga melakukan berbagai kegiatan pelatihan untuk menambah kapasitas para petani dengan didukung oleh pihak eksternal seperti NGO dan mahasiswa yang memiliki kepedulian pada isu ini.

Perampasan tanah dan kriminalisasi terhadap yang mereka rasakan, membuat mereka semakin mawas diri untuk terus berkembang dan menambah pengetahuan-pengetahuan terkait pertanian. Menyadari bahwa tanah sebagai suatu urat nadi dan satu-satunya sumber kehidupan petani. Petani yang tadinya hanya sebatas mengolah lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang pada prosesnya juga mengalami gagal panen hingga terlilit hutang oleh para tengkulak, kini mulai membenahi diri. Secara perlahan mulai merubah cara berfikir tentang tata cara pengelolaan lahan yang arif dan bijak, memanfaatkan lahan garapan dengan penggunaan berbagai sumber daya alam yang ada disekitar, mengolahnya menjadi berbagai jenis pupuk dan nutrisi bagi tanaman tanaman.

Tidak hanya sampai di situ, pelatihan yang dilakukan bersama beberapa aktivis dan NGO juga turut membantu dalam proses membangun gerakan. Serikat Petani Piondo yang tadinya dimaksudkan untuk pembebasan tanah, kini menjadi gerakan pemberdayaan berkelanjutan. Gerakan berkelanjutan ini justru kemudian menjadi satu ide besar dalam memperjuangkan hak atas tanah, tidak melulu tentang pembebasan lahan namun juga peningkatan kualitas hidup petani secara mandiri. Salah satunya adalah gerakan petani dengan menerapkan pola-pola pertanian alami dengan melakukan manajemen pengelolaan produk turunan untuk beberapa jenis tanaman rempah yang bisa diolah. Pengelolaan ini meningkatkan hasil produksi dan penjualan pasca panen, serta mengurangi ketergantungan terhadap jerat tengkulak.

- 5) *Expanding repertoires of contention*. Hingga saat ini, perjuangan petani telah menemui beberapa keberhasilan. Secara *de facto*, petani sudah menguasai lahan garapannya. Sebagai kelanjutannya, kini petani berjuang untuk menjaga lahannya dari segala bentuk ancaman perampasan hak tanah yang sudah mereka miliki. Dinamika di dalam mereka sendiri terus berkembang menjadi kerja-kerja yang dilakukan secara terorganisir, yaitu melakukan kampanye dan mempraktikkan pola-pola pertanian alami. Selain itu, kelompok tani juga berkesempatan menyebarluaskan praktik pertanian serta pengolahan pasca-panen kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan agar selain memperjuangkan kemerdekaan lahan, petani juga menjadi agen pertanian alami yang berkelanjutan bagi alam yang sudah memberikan mereka penghidupan.

Tahapan Gerakan Sosial Tarrow	Dimensi Gerakan Petani Desa Piondo
1 <i>Heightened conflict</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijin Pemerintah Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT BHP dan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT KLS.</li> <li>• Adanya konsekuensi perampasan tanah adat,</li> </ul>

	<p>perampasan tanah rakyat, penggusuran lahan bersertifikat, pembabatan hutan, dan sengketa proyek transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan lahan milik masyarakat desa Piondo</li> <li>• 184 Ha areal perkebunan milik petani Desa Piondo tumpang tidih dengan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan.</li> <li>• Adanya keresahan akibat berkurangnya lahan garapan sebagai sumber utama kehidupan.</li> </ul>
2	<p><i>Geographic and sectoral diffusion,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat atas keresahan akibat dari berkurangnya lahan garapan</li> <li>• Kebutuhan atas hak hidup dan tanah sebagai sumber utama penghidupan kaum tani menjadi dorongan utama perlawanan petani kepada perusahaan</li> <li>• Hampir setiap wilayah desa yang berada di dataran Toili.</li> </ul>
3	<p><i>Social movement organizations</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun konsolidasi antar masyarakat untuk berlawan</li> <li>• Mengajak orang-orang yang mengalami keadaan yang sama terhadap kekhawatiran atas kehilangan lahan garapan.</li> <li>• Berdiskusi mencari jalan keluar secara bersama.</li> <li>• kesepakatan untuk membentuk serikat tani di dataran Toili dengan basis pengelolaannya dibagi di setiap desa.</li> </ul>
4	<p><i>New frames of meaning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melalui serikat tani, menambah pengetahuan-pengetahuan terkait pertanian.</li> <li>• Menyadari bahwa tanah sebagai suatu urat nadi dan satu-satunya sumber kehidupan petani.</li> <li>• Serikat tani sebagai wadah perjuangan dalam memperebutkan hak atas tanah termasuk keluar</li> </ul>

	<p>dari jerat tengkulak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merubah cara berfikir tentang tata cara pengelolaan lahan yang arif dan bijak, memanfaatkan lahan garapan dengan penggunaan berbagai sumber daya alam yang ada disekitar, mengolahnya menjadi berbagai jenis pupuk dan nutrisi bagi tanaman tanaman.</li> </ul>
5 <i>Expanding repertoires of contention</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja-kerja secara organisatoris yang terorganisir</li> <li>• kerja-kerja yang dilakukan secara terorganisir, yaitu melakukan kampanye dan mempraktikkan pola-pola pertanian alami.</li> <li>• Selain itu, kelompok tani juga berkesempatan menyebarluaskan praktik pertanian serta pengolahan paska-panen kepada kelompok lain.</li> <li>• Hal ini dilakukan agar selain memperjuangkan kemerdekaan lahan, petani juga menjadi agen pertanian alami yang berkelanjutan bagi alam yang sudah memberikan mereka penghidupan.</li> <li>• Menjadi bagian dari gerakan sosial petani yang berada di sulawesi tengah.</li> </ul>

**Tabel 1. Tahapan Gerakan Serikat Petani Piondo**

Gerakan ini kemudian mendapatkan respon dan dukungan positif dari berbagai kalangan, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah dimana banyak petani di desa lain yang mengalami permasalahan perampasan tanah dan kriminalisasi terhadap petani. Tidak hanya di dataran Toili, gerakan ini kemudian berkembang dan menjadi aliansi. Dalam beberapa aksi yang dilakukan dikalangan mahasiswa, isu tentang pengembalian hak atas tanah juga menjadi isu sentral termasuk kasus Serikat Petani Piondo. Dalam beberapa kesempatan, para petani-petani ini masih terus terlibat dalam

demonstrasi dari tingkat dataran Toili, dan kabupaten termasuk di Ibu Kota Provinsi.

James Scott dalam mekanisme *survival* memberikan pandangan bahwa petani akan melakukan langkah-langkah tertentu untuk bertahan hidup. Gerakan yang dilakukan oleh petani Piondo ini merupakan sebuah mekanisme untuk bertahan hidup ketika lahan sumber pangan mereka direbut oleh perusahaan. Sebagai dampak dari perampasan lahan yang dilakukan PT HBP dan PT KLS, petani dan keluarganya terpaksa harus hidup dalam kondisi minimal dimana kualitas pangan yang dikonsumsi menurun karena ketiadaan lahan pertanian. Petani Piondo mengatasi situasi ini dengan memanfaatkan hasil tanaman yang di pekarangan rumah seperti singkong, ubi jalar, pisang, dan rimpang.

Keadaan menuntut petani untuk mencari ide agar bisa swadaya mendapatkan sumber penghasilan lain bagi keluarga. Terutama ketika kebutuhan sehari-hari tidak hanya persoalan pangan, sehingga sebagian hasil kebun harus dijual untuk mendapatkan uang. Beberapa petani kemudian mencoba mencari tambahan pendapatan sebagai buruh kasar dan upahan. Perempuan petani di Piondo kemudian juga menemukan cara-cara untuk memberikan nilai tambah dari hasil panen rimpang yang diperoleh dari kebun. Mereka sedikit demi sedikit mengolahnya menjadi produk minuman yang memiliki nilai tambah.

Jaringan yang awalnya dimiliki oleh petani adalah tetangga terdekat dalam satu desa. Mereka berupaya membantu satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan pangan bersama. Hingga akhirnya mereka tidak lagi berjuang sendirian untuk menghadapi permasalahan ini ketika LSM dan kelompok-kelompok mahasiswa ikut membantu mereka memperjuangkan hak untuk mendapatkan lahan pertanian mereka kembali. Pada akhirnya, jaringan ini juga yang menjadi bagian dari serikat tani. Mereka semakin memperluas jaringannya sehingga gerakan pembebasan lahan petani Piondo menjadi kepedulian bersama.

Gerakan yang muncul dari meluasnya jaringan ini tidak hanya seputar pembebasan lahan yang direbut perusahaan. Menarik di sini bahwa justru gerakan juga memunculkan isu tentang pertanian berkelanjutan yang menjaga kualitas tanah agar dapat diolah dalam jangka waktu lama. Selain

itu, isu kemandirian petani juga muncul karena kesadaran bahwa petani seharusnya bisa mengolah hasil panennya dengan lebih baik. Oleh karena itu, hasil olahan petani juga menjadi salah satu komoditas untuk dijual. Berbagai pelatihan dilakukan dari jaringan di luar petani agar bisa memberikan nilai tambah dari hasil panen rimpang yang dihasilkan.

Pandangan tentang etika subsistensi James Scott menegaskan bahwa petani bisa melakukan pembangkangan kepada pihak penguasa yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Inilah yang kemudian menjadi landasan dari gerakan-gerakan yang dilakukan petani piondo bersama dengan kelompok LSM dan mahasiswa. Mereka menolak untuk menjalani hidup dengan keterbatasan bahan pangan, sehingga melakukan gerakan-gerakan pembebasan. Lebih jauh lagi, mereka juga menjalankan metode pertanian berkelanjutan dan juga mengolah hasil panen agar memiliki nilai tambah. Proses menuju kemandirian menjadi tahap selanjutnya yang dilakukan oleh petani. Berbekal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan adanya pengembangan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh jaringan yang dimiliki petani, menjadikan petani belajar bagaimana untuk keluar dari masa-masa sulit yang dihadapi.

### **KONDISI TERKINI SERIKAT PETANI PIONDO**

Perjuangan panjang petani Piondo terus berlanjut dan tidak berhenti sampai di situ, mereka mengorganisir diri hingga membentuk organisasi tani lokal dan dilanjutkan dengan merebut posisi politik Desa. Perjuangan mereka pun mendapat titik terang setelah +/- 10 tahun dari awal perjuangan, pasca pengakuan secara de facto atas tanah yang mereka perjuangkan.

Melalui proses penguatan organisasi, yang solid kemudian Serikat Petani Piondo mencalonkan salah satu kader terbaknya untuk turut dalam proses pemilihan kepala desa. Hal ini dianggap sebagai suatu langkah strategis untuk merebut posisi kekuatan politik desa. Sepanjang proses perjuangan, petani Desa Toili tidak hanya harus berhadapan dengan para penguasa modal dan pemerintah tetapi pemerintah desa sendiri juga menjadi satu hambatan dalam memperjuangkan hak petani. Hal ini dikarenakan aparat desa menjadi perpanjangan tangan perusahaan.

Pengakuan secara *de facto* bukan menjadi suatu akhir dari proses penguasaan lahan yang dimiliki. Legalitas atas hak tanah yang dimiliki menjadi salah satu yang masih diperjuangkan. Selain itu pengembangan produk turunan juga menjadi salah satu langkah menambah nilai jual hasil pertanian, seperti pengembangan produk jamu-jamuan hasil dari olahan tanaman seperti jahe, kencur, temu lawak yang dikelola secara kolektif melalui unit usaha Koperasi perempuan yang dimiliki Serikat Petani Piondo.

Selain koperasi perempuan, Serikat Petani Piondo juga mengembangkan laboratorium pengembangan pupuk alami dan nutrisi tanaman alami yang diolah dari sumber daya alam yang ada di wilayah Desa Piondo. Pengembangan ini dilakukan sebagai bentuk perjuangan terhadap penggunaan bahan kimia serta mengurangi ongkos produksi pertanian.

Hingga saat ini, Para petani masih memperjuangkan hak atas tanahnya. Perjuangan yang awalnya dilakukan dengan aksi-aksi protes melalui demonstrasi kini bertransformasi menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Artinya bahwa gerakan yang berfokus pada penataan struktur ekonomi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya agraria secara berkelanjutan, dalam mengelola alam, menjaga ekosistem menjadi satu isu yang terus digaungkan oleh petani.

Program petani pelatih merupakan suatu program yang menekankan bahwa petani bisa melatih sesama petani lainnya untuk menerapkan pola-pola pertanian ramah lingkungan. Walaupun pola pertanian organik sepenuhnya belum diterapkan oleh masyarakat Piondo secara keseluruhan, setidaknya konsep ini membuktikan bahwa ada sebagian kecil petani yang berfokus pada pola pertanian organik di tengah maraknya praktek pertanian konvensional. Melalui program petani pelatih, Bapak Edy selaku anggota SPP mendapatkan undangan sebagai fasilitator untuk berbagi pengetahuan di beberapa komunitas petani. Hal ini sebagai bentuk proses menyebarkan gerakan pertanian alami yang berfokus pada keseimbangan ekosistem.

Selain itu, SPP juga membentuk model pengelolaan secara kolektif yang diperkuat dengan unit badan usaha bersamaan dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam Perempuan Tani. Selain melakukan simpan pinjam, proses

pengelolaan koperasi ini juga bergerak dalam dalam bidang pengolahan berbagai jenis tanaman rimpang dari hasil bumi masyarakat seperti jahe, kencur, temulawak dan kunyit. Pengolahan jenis rimpang menjadi berbagai produk turunan jamu-jamuan tradisional yang siap konsumsi (minuman seduh) dapat menjadi satu solusi ketika kondisi nilai jual hasil panen sedang sangat rendah.

## **KESIMPULAN**

Gerakan yang dikenal dengan Serikat Petani Piondo (SPP) merupakan respon dari konflik antara petani dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dan PT Berkas Hutan Pusaka (BHP). Petani yang direbut lahan petaniannya mengalami penurunan kualitas kehidupan sehari-hari dan terancam tidak bisa lagi bertani. Pandangan James Scott tentang mekanisme survival menunjukkan bahwa petani harus menurunkan kualitas pangan mereka sehari-hari agar bisa memenuhi kebutuhan makan bagi seluruh keluarganya. Kemudian, mereka juga perlu melakukan upaya-upaya swadaya agar kebutuhan lain juga bisa terpenuhi. Ini diupayakan dengan menjual berbagai hasil olahan panen petani. Jaringan yang kemudian muncul rupanya juga mendorong adanya gerakan yang lebih luas.

Kondisi yang dialami petani Piondo memicu ide atau gagasan gerakan tersebar dari daerah yang berkonflik (*central*) dan meluas ke daerah lain (*peripheral*) dan kemudian memicu munculnya gelombang protes secara massal. Munculnya organisasi (SPP) memastikan strategi dan hasil yang ingin dicapai. Gerakan protes yang dilakukan sebelumnya melahirkan ideologi-ideologi baru yang menjadi landasan pemahaman atas realitas yang dialami.

Pada siklus ini, gerakan sosial menjadi wadah bagi gerakan atau protes-protes baru yang akan muncul kemudian. Serikat Petani Piondo (SPP), menjadi suatu wadah perjuangan bagi petani, tidak hanya itu, serikat menjadi rumah bagi membangun kemandirian, dalam meningkatkan kapasitas setiap anggotanya. penelitian ini menemukan bahwa gerakan tidak hanya berbicara tentang pembebasan lahan, namun juga membahas tentang isu-isu keberlanjutan dalam pengolahan lahan secara alami dan pemberian

nilai tambah hasil panen untuk meningkatkan pendapatan petani. Semangat kemandirian membuat gerakan SPP tetap hidup dan berkembang sampai sekarang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa gerakan sosial seharusnya tidak hanya berhenti pada pembebasan lahan itu sendiri, tetapi juga berorientasi pada kemandirian. Semangat perjuangan yang dilakukan oleh para petani juga tidak berhenti pada penguasaan lahan saja. Pemberdayaan berkelanjutan, dalam menunjang peningkatan ekonomi menjadi satu langkah tersendiri yang harus dilakukan dalam memperjuangkan hak kelola atas konflik agraria.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, T. C. 2013. "Perampasan Tanah Dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 37:157–68.
- Badrah, A. 2011. "Evaluasi Advokasi Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah Di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah." *Jurnal Studi Pemerintahan* 2(2):238–58.
- Bernstein, Hendry. 2019. *Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria. Seri Kajian Petani Dan Perubahan Agraria*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Cahyono, Eko. 2017. "Gemah Ripah Loh Jinawi, Untuk Siapa?": Makin Jauhnya Cita-Cita Kedaulatan Agraria." *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 1(1):65–79.
- Cresswell, J. David. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed (Terj)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadli, Ardiansyah. 2021. "Sepanjang 2020 Konflik Agraria 241 Kasus, Tertinggi Sektor Perkebunan." Retrieved (<https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/160000521/sepanjang-2020-konflik-agraria-241-kasus-tertinggi-sektor-perkebunan>).
- Fahrimal, Yuhdi, and Safpuriyadi. 2018. "Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia." *Jurnal Riset Komunikasi* 1(1):109–27.
- Hak, Imamul, Hajir Nonci, and Tri Budiarto. 2019. "Ragam Intervensi Di Pedesaan: Resolusi Konflik Agraria Menuju Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) Di Desa Uraso." *SOSIORELIGIUS* 4(1).
- KPA. 2021. "Laporan Konflik Agraria Di Masa Pandemi Dan Krisis Ekonomi." Retrieved ([http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/92/Catahu\\_2020\\_KPA\\_Edisi\\_I:\\_Laporan\\_Konflik\\_Agraria\\_di\\_Masa\\_Pandemi\\_dan\\_Krisis\\_Ekonomi/](http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/92/Catahu_2020_KPA_Edisi_I:_Laporan_Konflik_Agraria_di_Masa_Pandemi_dan_Krisis_Ekonomi/)).
- LBH-Jakarta. 2014. "PERJALANAN KASUS EVA BANDE, AKTIVIS YANG DIKRIMINALISASI." Retrieved (<https://bantuanhukum.or.id/perjalanan-kasus-eva-bande-aktivis-yang-dikriminalisasi/>).
- Novianto, Arif. 2017. "Mendistorsi Hegemoni Dan Anti-Esensialisme :

- Analisa ‘Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan’ Dalam Kerangka Liberalisme.” *BHUMI, Jurnal* 3(2):279–85.
- Putra, Agus Andika. 2020. “GERAKAN SOSIAL DAN PERTARUNGAN SUMBER DAYA (Perlawanan Persatuan Tani Demokratik Terhadap Penguasaan Sumber Daya Oleh PT KCMU Di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung).” Universitas Gadjah Mada.
- Sabar, Lindayanti. 2017. “Jalan Terjal Membentuk Karakter Bangsa: Dialektika Petani Verses Penguasa Dan Pengusaha Di Sumaterra, Riau Dan Jambi 1970-2010.” *Jurnal Analisis Sejarah* 6(2):146–57.
- Scott, James. 1994. *Moral Ekonomi Petani; Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Stake, Robert E. 1995. *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.
- Tarrow, Sidney. 1993. “Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness and the Repertoire of Contention.” *SOCIAL SCIENCE HISTORY* 17(2):281–307.
- Tarrow, Sidney. 1995. “The Europeanisation of Conflict: Reflections from a Social Movement Perspective.” *West European Politics* 18(2):223–51.
- Tarrow, Sidney. 2011. *Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics; Revised and Updated Third Edition 3rd Ed*. New York: Cambridge University Press.
- Wahyudi, Wahyudi. 2010. “FORMASI DAN STRUKTUR GERAKAN SOSIAL PETANI [Studi Kasus Gerakan Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 12(1):19–42.
- Yin, Robert. K. 2009. *Case Study Research Design and Methods*. Sage Publication.
- Zaiful. 2020. “Perlawanan Perempuan Adat Wana Posangke Dalam Mempertahankan Identitas Kultural.” *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 4(1):33–45.